

# “Hakim Menggugat”

Gonjang-ganjing seputar laporan yang berujung perseteruan antara Hakim Agung MA Gayus Lumbuun dengan Sekretaris MA Nurhadi, telah menyulut anggapan atau penilaian banyak pihak tentang kondisi sebenarnya “dapur” lembaga tertinggi bagi para pencariian keadilan itu. Maka wajar, jika Juru bicara MA Djoko Sarwoko buru-buru menepis pandangan negatif yang secara umum akan menysasar lembaganya. Baru-baru ini Joko menyatakan bahwa Sekretaris MA Nurhadi (sebagai pihak yang dilaporkan Gayus) akan melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.

Maksud Joko dapat dipahami sebagai bagian dari pencitraan lembaganya. Namun demikian, kasus ini tetap menyisakan banyak kejanggalan dan tidak boleh berhenti sampai pada keterangan Juru Bicara MA saja. Yang pasti, sampai berita ini ditulis (07/11/12) Nurhadi diberitakan belum juga menyampaikan LHKPN ke KPK.

Berikut pendapat dua narasumber DIALOG HUKUM berjudul “Hakim Menggugat”, terselenggara atas kerjasama KHN dengan Kantor Berita Radio (KBR 68H Jakarta (7 Nopember 2012).



**MOHAMMAD FAJRUL FALAAKH,**  
*Anggota KHN*

## Transparansi MA: “KPK Harus Mencari Laporan”

Seharusnya Nurhadi segera menyampaikan LHKPN kepada KPK, karena dia punya kewajiban untuk menyerahkan itu. Semakin menunda maka akan semakin memperkuat dugaan ada yang disembunyikan, dan semakin kuat pula kebenaran Laporan yang disampaikan Gayus Lumbuun tentang kurangnya transparansi di tubuh MA. “Semakin lama Nurhadi tidak melapor malah akan menjadi alasan kecurigaan KPK. Apalagi hal

ini telah mencuat ke publik,” jelas Fajrul.

KPK menurut Dosen FH Universitas Gajah Mada ini, dipastikan akan menyoroti secara khusus persoalan yang telah menyedot perhatian publik ini. Alasannya, karena nampak sekali ada sesuatu yang disembunyikan. Yang dilakukan KPK, mungkin belum sampai pada tahapan penyelidikan, tapi masih harus mencari laporan. “Jika dokumen yang didapat aneh akan jadi alasan KPK untuk melakukan penelitian lebih lanjut,” terang Fajrul.

Terkait terjadinya simpang siur waktu pelaporan, Fajrul merasa ada yang janggal. “Saya kira ada salah satu pihak yang berbohong yaitu bisa Djoko Sarwoko atau Nurhadi,” ungkap Fajrul. Akan tetapi, Fajrul mengaku belum tahu, mungkin itu pengakuan Nurhadi jadi harus *crosscheck*. Mungkin juga laporan sudah disusun tapi belum dikirim.]]